

**PRODUKSI RUANG HIDUP MASYARAKAT PESISIR  
DI WILAYAH LINGKAR TAMBANG  
(STUDI ETNOGRAFI DI DUSUN SUKOREJO, KABUPATEN MALANG)**

**RIZQI SAMUDRA MUHAMMAD  
NIM 0811213058**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai kondisi masyarakat pesisir Pantai Wonogoro Dusun Sukorejo yang mengalami sebuah produksi ruang hidup dengan adanya eksploitasi pertambangan pasir besi yang dilakukan oleh Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) di wilayah hidup mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ruang hidup masyarakat pesisir Pantai Wonogoro diproduksi dengan adanya perubahan kewilayahanyang terjadi di Dusun Sukorejo sebagai daerah lingkaran tambang Koperasi Tambang Indonesia III.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami produksi ruang hidup masyarakat pesisir di masa lalu dan saat ini di wilayah lingkaran tambang KTI III. Penelitian ini menggunakan kajian tentang produksi ruang Henri Lefebvre. Kajian Lefebvre tentang penciptaan ruang mutlak, abstrak dan diferensial digunakan untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat pesisir. Kajian tersebut digunakan dalam analisis produksi ruang antara representasional ruang dari pengetahuan lokal masyarakat pesisir dan representasi ruang lingkaran tambang dari KTI III dengan adanya eksploitasi pertambangan pasir besi yang ada di wilayah pesisir Pantai Wonogoro. Metode Penelitian ini adalah etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi yang dimiliki KTI III mampu memberikkan representasi ruang baru di dalam ruang hidup masyarakat pesisir dengan berbagai representasi ruang. Hal ini memunculkan berbagai kesepakatan ekonomi antara masyarakat dan pihak KTI III. Namun representasi ruang baru yang dilakukan oleh KTI III dengan adanya

wilayah lingkaran tambang, tidak sepenuhnya dapat merubah representasional ruang yang dihasilkan dari warisan pengetahuan lokal nenek moyang masyarakat pesisir.

Kata Kunci : masyarakat pesisir, lingkaran tambang, produksi ruang

### **ABSTRACT**

This study discussed the condition of coastal people in Wonogoro beach. Sukorejo village who was experiencing the production of living space related to the exploitation of ferruginous sand mining activity carried out by Indonesian Mining Cooperative III (KTI III) in their life area. The space representation around the mine area presented by KTI III affect local's knowledge on the production of living space that has been done by the coastal communities became a representational space in their everyday lives.

The objective of this study was to understand the production of living space in the coastal people on the past and today in the area around the main KTI III. This study used Henri Lefebvre's theory, the production of space study. Lefebvre's study about the creation of an absolute space, abstract space and differential were used to describe the condition of coastal people. That study used in the analysis on the production of space between representasional space of local knowledge and space representations around the mine area of KTI III with the exploitation of ferruginous sand mining in coastal areas, Wonogoro Beach. The research methods used qualitative ethnographic approach through interviews, observations and literature review.

The result of this study showed that the economic power held by KTI III was able to give new space representations in the coastal people's living space with various representations of space. This condition led to the various economic agreements between the people and the KTI III. However the new space representations made by KTI III within the area around of mine, did not fully able to change the coastal people's representasional space resulted from the legacy of local knowledge ancestors.

**Keywords:** *coastal people, mine area, space production*

### **A. Representasi Ruang Masyarakat Pesisir**

Representasi ruang yang dialami oleh masyarakat pesisir pantai Wonogoro di dusun Sukorejo. Diantaranya meliputi : 1) dalam representasi ruang masyarakat, wilayah pesisir Wonogoro memiliki batas wilayah barat mereka adalah sungai Berek dan di ujung timur adalah pantai Nganteb yang dibagian selatan langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di wilayah utara merupakan ladang bertani masyarakat yang berbatasan dengan Dusun Pohkechik. Batas wilayah tersebut selain menjadi batas wilayah pesisir pantai Wonogoro juga digunakan untuk meleakukan aktifitas kehidupan sehari-hari, 2) dalam kesejarahan Wonogoro dibabat yang dipimpin oleh Pak Amir dan juga berasal dari Mataram. Wonogoro artinya *wono* : hutan, *goro* : laut jadi Wonogoro maksudnya hutan berada di pinggir laut. Pada saat itu Wonogoro sangat wingit sekali dan lama tidak dihuni orang karena banyak orang yang meninggal disitu. Pada saat Indonesia dijajah oleh Nippon (Jepang), didaerah Wonogoro oleh pemerintah Jepang dijadikan pusat latihan / kerja paksa masyarakat. Masyarakat diperintah untuk membuat *rajeg*<sup>1</sup> atau pagar dipantai Wonogoro. Sehingga banyak masyarakat yang meninggal karena penyakit malaria dan karena kelaparan pada saat itu seperti yang dikatakan oleh Pak Karnam selaku Sekertaris Desa Tumpakrejo, 3)sekitar tahun 1980 dusun Sukorejo pesisir pantai Wonogoro menjadi daerah tujuan perpindahan masyarakat dari daerah sekitar. Mayoritas masyarakat berasal dari desa Desa Srigonco ini dilakukan karena lahan mata pencaharian masyarakat berupa ladang pertanian di desa Srigonco yang mereka tanami sebelumnya adalah tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI -AL) pangkalan Purboyo. Di sekitar tahun 1980 itu pula mata pencaharian masyarakat pesisir pantai Wonogoro masih sebagai pencuri kayu di hutan milik pemerintah yang dikelola oleh Perhutani. Karena pengetahuan menebang kayu di dapatkan dari nenek moyang mereka, maka sampai pada sekitar tahun 2000 hutan milik perhutani yang diatas bukit habis, ditebang oleh penduduk karena seiring

---

<sup>1</sup> Pagar pe,batas pantai yang terbuat dari pohon

kebijaksanaan pemerintah pada masa itu masyarakat di sekitar pesisir wilayah pantai dibebaskan menebang hasil hutan yang ada seperti kayu jati, mahoni, sengon, akasia dan lain-lain seperti yang dikatakan Pak Robidin dan Pak Pandri , 4) Masyarakat membangun tempat tinggal di belakang batas perbukitan pesisir pantai Wonogoro dan sebagian juga memilih di Timur pesisir pantai karena berdekatan dengan laut maka, secara administratif wilayah tempat tinggal masyarakat terpisah dalam dua kawasan Rukun Tetangga (RT) yaitu: RT 56 dan RT 57 sekitar ada 83 rumah tempat tinggal, 5) dalam representasi ruang masyarakat pesisir pantai Wonogoro yang ada di RT 56, mayoritas untuk kegiatan mandi, mencuci, dan buang air (MCK) dilakukan di sebelah timur aliran sungai Berek yang berjarak sekitar 300 m dari tempat tinggal mereka. Wilayah aliran bagian utara sungai Berek mayoritas (MCK) oleh masyarakat pesisir RT 57 yang berada tepat dibelakang rumah mereka, 6) bagi yang memiliki modal untuk mengurus perijinan pertanahan masyarakat menggunakan tanah datar yang berada di belakang tempat tinggal mereka untuk bercocok tanam : bertani tebu, padi, pisang, jagung dan kelapa. Bertani tebu dengan penghalan perhari sekitar Rp40.000perhari seperti yang dikatakan Pak Nyarimin. Namun bagi yang tidak memiliki modal menggunakan tanah di bukit pantai untuk bercocok tanam dan sebagian juga memanfaatkan wilayah pesisir pantai di bagian timur untuk mencari ikan dan hasilnya untuk konsumsi pribadi, 7) sekitar tahun 1990 tanah di wilayah pesisir sebelah barat yang merupakan tanah milik masyarakat Wonogoro dibeli oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI- AD). Karena rencana tanah tersebut akan dijadikan markas pertahanan TNI-AD. Namun kenyataan yang terjadi karena letak wilayah pesisir pantai Wonogoro yang strategis dan memiliki sumber-sumber daya kehidupan yang dapat dikembangkan, maka tanah tersebut di tahun 1998 disewakan untuk dijadikan tempat pembudidayaan tambak udang Cp Prima hal ini pula yang memicu protes yang dilakukan masyarakat seperti di katakan Pak Nyarimin, penghasilan berkerja ditambah sekitar RP.35.000,- perhari seperti yang dikatakan Mas Lasiono 8) di tahun yang sama, karena ada (SDA) berupa pertambangan pasir besi wilayah pesisir pantai Wonogoro masuklah investor dari Korea untuk melakukan eksplorasi. Namun karena tidak dilengkapi dengan surat ijin yang lengkap, akhirnya mereka gagal untuk melakukan eksplorasi pasir besi di pesisir pantai Wonogoro. Namun ditahun 2013 dengan

berdasarkan atas surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Di tahun 2013 berdasarkan atas surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dimana kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67 UU No. 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara) yang terdaftar di rekonsiliasi Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan juga masuk dalam peta tambang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang eksploitasi pertambangan pasir besi di pesisir pantai Wonogoro yang dilakukan oleh KTI III mampu merepresentasikan ruang wilayah pesisir pantai Wonogoro menjadi wilayah lingkaran tambang, 9) sehingga sekitar tahun 2002 melalui program kemitraan pengaspalan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang, bersama-sama dengan masyarakat pesisir pantai Wonogoro membuat jalan akses dari kecamatan menuju wilayah pesisir pantai Wonogoro sekitar sepanjang 15 kilometer (km) seperti yang dikatakan Pak Nyarimen. 10) Tradisi budaya seperti upacara pernikahan “nyinoma” dan “mamdhulan” sangat terpelihara didalam masyarakat pesisir.

## **B. Pertarungan Ruang Representasional**

Seiring perkembangan dasawarsa terakhir perubahan fungsi keruangan kewilayahan pesisir pantai Wonogoro, menyebabkan praktik sosial aktifitas kehidupan keseharian masyarakat pesisir pantai Wonogoro juga mengalami perubahan. Sehingga Dalam hal ini pertarungan ruang representasioanal lebih mengarah pada pengetahuan lokal masyarakat pesisir pantai Wonogoro dalam berkehidupan sebelum adanya kelompok dominan KTI III di daerah wilayah pesisir pantai Wonogoro. Dimana representasioanal ruang yang selamainya menjadi pengetahuan lokal masyarakat pesisir terhadap wilayah pesisir pantai Wonogoro sebagai wilayah aktivitas kehidupan, telah bergeser karena praktik kapitalisasi, dikonversi menjadi pengetahuan representasi ruang wilayah lingkaran tambang Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III).

Eksploitasi pertambangan pasir besi yang dilakukan KTI III telah menciptakan representasi ruang baru sebagai wilayah lingkaran tambang di wilayah pesisir pantai Wonogoro sehingga secara sosial ruang sosial menjadi sarana untuk meraih dan menciptakan kontrol. Representasi ruang lingkaran tambang yang direpresentasikan oleh

Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) di pesisir pantai Wonogoro, berusaha untuk menciptakan kontrol terhadap representasional ruang yang ada dalam pengetahuan masyarakat mengenai wilayah pesisir pantai Wonogoro, untuk menjalankan aktifitas keseharian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir Wonogoro.

Hal ini terlihat pada kondisi pesisir pantai Wonogoro yang sebelah timur dan kondisi pesisir Pantai Wonogoro sebelah barat yang direpresentasikan Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) menjadi wilayah eksplorasi pertambangan pasir besi.

Sekitar tahun 2013 KTI III masuk ke pesisir barat Pantai Wonogoro untuk melakukan eksplorasi pertambangan pasir besi di didaerah tersebut dengan durasi kontrak selama lima (5) tahun dan dapat diperpanjang bila kontrak telah habis. Pergeseran itu terlihat ketika dalam representasional ruang masyarakat pesisir panta Wonogoro bahwa wilayah bukit pesisir pantai sebelah barat yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Berek dalam representasional masyarakat pesisir pantai Wonogoro dikenal angker karena dijadikan pusat latihan atau kerja paksa sehingga sering terdengar tentara Jepang yang sedang melakukan baris berbaris atau tangisan orang karena dahulunya disitu merupakan benteng pertahanan milik Jepang. Namun, seiring dengan perubahan yang terjadi representasional angker yang dipahami oleh masyarakat pesisir Pantai Wonogoro hilang, dengan representasi yang dilakukan oleh pihak KTI III wilayah bukit sebelah barat tersebut dijadikan daerah seperti yang dikatakan Pak Robidin.

Luas wilayah yang menjadi daerah pertambangan pasir basi sekitar 10 hektar berada di sebelah bukit barat pesisir pantai Wonogoro, yang dibatasi oleh pihak Koperasi Tambang Indonesia III dengan membangun tiga pos penjagaan di ujung barat yang berbatasan dengan sungai Berek di selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan di timur dengan tambak udang Cp Prima dan bukit Wonogoro yang berada di sebelah pantai Nganteb. Representasi ruang dianggap sebagai ruang yang paling benar oleh Koperasi Tambang Indonesia III untuk mencapai serta memelihara dominasi dengan merepresentasikan lingkaran tambang wilayah pesisir Pantai Wonogoro.

### **C. Kesepakatan Ekonomi vs Konservasi Lingkungan**

Kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat pesisir pantai Wonogoro dan

pihak KTI III dengan representasi wilayah pesisir pantai Wonogoro menjadi daerah lingkaran tambang adalah menyangkut kesepakatan ekonomi. Adanya KTI III yang merepresentasi wilayah pesisir pantai Wonogoro yang sebelumnya merupakan tempat kehidupan masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan seperti memancing memenuhi kebutuhan hidup keseharian, maka pihak KTI III dan masyarakat pesisir pantai Wonogoro bersama melakukan berbagai kesepakatan ekonomi karena wilayah pesisir pantai Wonogoro yang telah direpresentasi menjadi lingkaran tambang. Kesepakatan ekonomi pada awal sekitar tahun 2013 disepakati oleh pihak Koperasi Tambang Indonesia dengan Masyarakat pesisir pantai Wonogoro mengenai pembagian hasil penjualan per kilo Rp.500,- kepada masyarakat pesisir. Serta infrastruktur jalan kemudian diaspal untuk memudahkan aktivitas masyarakat pesisir pantai Wonogoro secara bertahap dengan kesepakatan 450 meter jalan kampung yang akan diaspal oleh pihak KTI III. Adanya pembangunan fasilitas umum pendukung masyarakat seperti membangun masjid yang ada di wilayah tersebut.

Kesepakatan ekonomi yang terjadi antara masyarakat pesisir dan KTI III memperlihatkan bahwa seperti yang dikatakan Lefebvre, produksi ruang dianggap dapat menghancurkan komunitas-komunitas lokal karena pengendalinya dikuasai oleh negara, dan penguasa modal (Lefebvre, 1991, hlm.30). Komunitas lokal dalam hal ini masyarakat pesisir pantai Wonogoro tidak memiliki kekuatan dalam menjaga wilayah pesisir pantai Wonogoro agar tidak direpresentasikan menjadi daerah lingkaran tambang. Dengan mudah kekuatan ekonomi kapital KTI III melakukan praktik ruang di wilayah pesisir pantai Wonogoro dengan merepresentasikan wilayah pesisir pantai Wonogoro menjadi wilayah lingkaran tambang karena telah ada kesepakatan ekonomi yang terjalin dengan masyarakat pesisir Pantai Wonogoro. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah juga menyebabkan masyarakat pesisir pantai Wonogoro dalam berkehidupan sangat tergantung dengan hasil alam yang mereka miliki di pesisir pantai Wonogoro.

Seiring dengan direpresentasikan oleh KTI III bahwa pesisir pantai Wonogoro sebagai daerah pertambangan pasir besi dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut sebagai masyarakat yang berada di lingkaran tambang KTI III. Sehingga banyak dari masyarakat untuk menjamin kebutuhan hidupnya, mereka bekerja di pertambangan

pasir besi Koperasi Tambang Indonesia III karena tidak perlu menyertakkan latar belakang pendidikan mereka. Pekerjaan yang diberikkan bermacam-macam mulai dari satpam, penyedia jasa masak untuk makan pegawai tambang, juga ada yang memiliki kemampuan menjadi penyedia jasa penyewaan truck pengangkutan pasir besi. Mayoritas masyarakat pesisir Pantai Wonogoro bekerja sebagai buruh penggali bagi yang laki-laki, dan yang perempuan sebagai buruh pembersih jalan untuk membersihkan pasir besi yang berada di jalan pengangkutan di lokasi pertambangan seperti yang dikatakan Pak Pandri.

Dalam konteks ini seperti yang dikatakan Lefebvre, nantinya representasi ruang memperlihatkan kebenaran abstrak yang diciptakkan agar mencapai sebuah dominasi, sesungguhnya representasional ruang lenyap ke dalam representasi ruang (Lefebvre, 1991, hlm. 38-39) dimana terlihat representasi ruang mata pencaharian baru sebagai pekerja atau buruh tambang mampu mendominasi dalam kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Wonogoro, seperti yang dikatakan informan Pak Lawan sehingga representasional matapencaharian sebelumnya dengan bertani atau berladang, dan menjadi pegawai tambak lenyap ke dalam representasi ruang matapencaharian baru yang dihadirkan oleh KTI III.

Bagai dua mata pisau yang tidak bisa dilepaskan dengan adanya eksplorasi pertambangan pasir besi di wilayah pesisir pantai Wonogoro. Satu sisi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar dirasakan oleh masyarakat pesisir pantai Wonogoro karena adanya kesepakatan ekonomi seperti yang terlihat diatas, namun di sisi lain dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan pasir besi cukup dikhawatirkan oleh masyarakat pesisir Pantai Wonogoro. Dalam pengelolaanya, masyarakat yang berada disekitar daerah tersebut direpresentasikan oleh KTI III sebagai masyarakat lingkar tambang pesisir pantai Wonogoro, maka terlihat seperti yang dikatakan Lefebvre, representasi ruang yang dihasilkan oleh KTI III terhadap ruang mutlak pesisir pantai Wonogoro dalam ruang abstrak pemikiran masyarakat pesisir pantai Wonogoro untuk menjalankan aktifitas kehidupan keseharian di pesisir pantai Wonogoro terus dihancurkan oleh kekuatan ekonomi politik KTI III untuk memenuhi keinginan kekuasaan terhadap ruang kehidupan di pesisir pantai Wonogoro. Sehingga produksi ruang mutlak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pesisir



pantai Wonogoro sebatas pada nilai pakai, sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat dalam melakukan aktifitas kehidupan di pesisir pantai Wonogoro. Masyarakat pesisir pantai Wonogoro tidak lagi mempersoalkan dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh adanya eksplorasi pertambangan pasir besi yang ada di daerah pesisir pantai Wonogoro karena adanya kesepakatan ekonomi antara masyarakat dan Koperasi Tambang Indonesia III.

Hal ini seperti yang dikatakan Lefebvere, jika ruang mutlak sebagai ruang yang didominasi, maka ruang abstraklah yang memiliki posisi sebagai pihak yang mendominasi. Oleh karena itu, kelas penguasa menggunakan ruang abstrak sebagai alat kekuasaan untuk mencapai pengendalian atas ruang yang semakin besar (Ritzer, 2012, hlm. 528). Ini terlihat dimana surat izin pertambangan yang dikantongi oleh KTI III seperti yang dikatakan oleh Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara kepada Bhirawa di *harianbhirawa.co.id* bahwa sebenarnya aktivitas tambang di Pantai Wonogoro diduga menyalahi aturan atau kalau ada ijinnya, ijin tersebut menyalahi Perda Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang. Namun karena adanya kesepakatan ekonomi yang dilakukan bersama masyarakat pesisir Pantai seperti keterangan yang disampaikan oleh Pak Nyarimen ini terlihat bahwa di dalam masyarakat dengan adanya pertambangan pasir besi di daerah pesisir Pantai Wonogoro secara bersamaan mereka ingin mendapat keuntungan dari keberadaannya KTI III di pesisir Pantai Wonogoro.

#### **D. Konstruksi Produksi Ruang Hidup Kini**

Pada ruang mutlak manusia menggunakan kemampuan masing-masing secara individu maupun kolektif untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup (Ritzer, 2012, hlm.537). Sehingga ruang alamiah pesisir Pantai Wonogoro dipahami oleh masyarakat sebagai ruang mutlak untuk melayani kebutuhan-kebutuhan kolektif masyarakat pesisir Pantai Wonogoro dalam berkehidupan sehari-hari.

Sekitar tahun 2013 semenjak adanya pertambangan pasir besi di lingkungan wilayah pesisir pantai Wonogoro yang dilakukan oleh Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III), produksi ruang hidup yang dilakukan masyarakat pesisir pantai Wonogoro di

dalam ruang mutlak pesisir Pantai Wonogoro untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka sedikit bergeser. Representasioanal ruang terhadap wilayah pesisir pantai Wonogoro sebagai ruang mutlak aktivitas kehidupan yang dipahami masyarakat pesisir pantai Wonogoro, telah bergeser karena dikonversi menjadi pengetahuan rerepresentasi ruang wilayah pesisir pantai Wonogoro sebagai wilayah lingkaran tambang.

Seperti yang dikatakan Lefebvre, ilmu pengetahuan membantu manusia dalam memaknai ruang sebagai *perceived space*, yaitu ruang yang dipersepsi dalam kerangka berpikir dan di representasi dalam tataran ruang yang semata simbolik atau *conceived space*, simbolisme tersebut bewujud dalam pembagian dominan yang sesungguhnya memarjinalisasi *lived space* atau ruang hidup (Lefebvre, 1991, hlm. 50-51). Hal ini, terjadi ketika ilmu pengetahuan dalam konteks ini yaitu pengetahuan wilayah pesisir Pantai Wonogoro yang menjadi *perceived space* yang kemudian dimaknai sebagai *conceived space* wilayah lingkaran tambang KTI III, dengan adanya kesepakatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir pantai Wonogoro dan pihak KTI III, sehingga masyarakat pesisir pantai Wonogoro mau menerima representasi ruang yang dihasilkan oleh KTI III di ruang mutlak pesisir pantai Wonogoro, dengan menerima kesepakatan ekonomi. Sehingga dari kesepakatan ekonomi tersebut sebenarnya muncul *lived space* dengan banyak konstruksi produksi ruang hidup yang dirasakan oleh masyarakat pesisir pantai Wonogoro.

Adanya representasi ruang yang dilakukan oleh KTI III menyebabkan adanya masyarakat ada yang pro dan kontra dengan keberadaan KTI III di wilayah ruang hidup mereka. Sehingga memunculkan sebuah konstruksi saat ini tentang produksi ruang hidup masyarakat pesisir di Pantai Wonogoro meliputi konstruksi saat ini tentang produksi ruang wilayah lingkaran tambang pesisir pantai Wonogoro, konstruksi saat ini tentang produksi ruang mata pencaharian masyarakat pesisir pantai Wonogoro, dan konstruksi tentang produksi ruang sosial kekerabatan masyarakat pesisir pantai Wonogoro saat ini.

#### **E. Wilayah Lingkaran Tambang**

Aktifitas keseharian masyarakat yang banyak dihabiskan di pesisir pantai Wonogoro, semenjak adanya kegiatan eksplorasi pertambangan pasir besi yang

dilakukan oleh KTI III mengalami pergeseran pembatasan ruang wilayah lingkup aktifitas kehidupan. KTI III memberi batasan bagi masyarakat untuk beraktifitas di pesisir pantai Wonogoro dengan ditunjukkan menggunakan pos penjagaan dan tanda larangan melintas di pesisir Pantai Wonogoro. Padahal sebelumnya dalam representasional masyarakat pesisir pantai Wonogoro, jika mereka ingin ke pesisir pantai Wonogoro tidak perlu ijin ke siapapun. Mereka tinggal jalan dan jika ada yang memakai kendaraan, bisa membawa kendaraan mereka sampai di pesisir pantai tanpa harus jalan kaki seperti yang dikatakan Bu Suranti.

Seperti yang dikatakan Lefebvre pada peristiwa tertentu representasional tentang ruang membantu manusia memaknai ruang sebagai ruang yang dipersepsi dalam kerangka berpikir dan direpresentasikan dalam tataran ruang yang semata simbolik. Simbolisme tersebut bewujud dalam pembagian dominan yang sesungguhnya memarjinalisasi *lived space*. *Lived space* adalah ruang yang memberi hak untuk perbedaan (Lefebvre, 1990:50-51). Sehingga *Lived space* itu dapat terungkap ketika representasional masyarakat tanpa ijin masuk ke area wilayah pesisir pantai yang direpresentasikan sebagai wilayah lingkaran tambang KTI III hanya untuk sekedar melakukan aktifitas memancing. Jika mereka ketahuan oleh pihak penjagaan dari KTI III, mereka akan hanya sekedar diingatkan, itupun kalau ada pemilik KTI III yang kebetulan berada di lokasi wilayah pertambangan. Kalau tidak ada pemilik masyarakat bebas untuk melakukan aktifitas di pesisir pantai Wonogoro yang juga menjadi wilayah pertambangan pasir besi KTI III. Sehingga di dalam masyarakat sendiri muncul dua kubu antara yang pro dan kontra dengan kegiatan yang dilakukan oleh KTI III. Masyarakat yang kontra disebabkan kurang terikatnya dengan aktivitas kegiatan pertambangan yang dilakukan KTI III sebaliknya dengan yang pro karena mereka terlibat sebagai pegawai KTI III.

#### **F. Mata Pencarian di Lingkaran Tambang**

Selain kesepakatan yang terjadi KTI III juga memberi pilihan pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir dengan menjadi bagian dari aktivitas pertambangan KTI III meliputi : satpam, penyedia jasa masak untuk makan pegawai tambang, juga ada yang memiliki kemampuan menjadi penyedia jasa penyewaan truck pengangkutan pasir besi.

Sehingga masyarakat mayoritas pesisir pantai Wonogoro memilih mata pencaharian sebagai pekerja di pasir besi KTI III yang cukup diminati masyarakat pesisir pantai Wonogoro karena persyaratannya pun juga tidak ada. Selain upah yang cukup besar pula seperti yang dikatakan Pak Pandri masyarakat pesisir pantai Wonogoro wanita yang menjadi buruh di pasir besi, juga masih bisa berkegiatan keseharian dengan representasional mata pencaharian pekerjaan mereka sebelumnya, karena di pagi hari mereka masih bisa berladang, baru mereka mulai bekerja di pertambangan pasir besi sebagai buruh bersih-bersih di pasir besi di sore hari sekitar pukul. 15.00 WIB. Sedangkan yang laki-laki walaupun mereka bekerja mulai di pagi hari sekitar pukul .7.30- 15.30 WIB. Namun setelah pulang bekerja sebagian dari mereka biasanya masih bisa melakukan aktifitas memancing di pesisir pantai Wonogoro.

Masyarakat pesisir pantai Wonogoro yang berusia muda lebih memilih untuk bekerja di tambak. Mata pencaharian yang diminati oleh usia produktif di pesisir pantai Wonogoro adalah bekerja di tambak karena hanya pada jam-jam tertentu mereka akan disibukkan dengan pekerjaan. Seperti jika mereka masuk *shift* pagi sekitar pukul 8.30 WIB, mereka langsung disibukkan untuk memberi makan udang setelah itu mereka akan banyak menganggur di tambak. Kemudian pukul 12.00 WIB mereka diberi kesempatan untuk istirahat makan. Karena letak rumah yang tidak begitu jauh maka mereka kebanyakan memutuskan untuk pulang kerumah dan kembali kerja sekitar pukul 14.00 wib mereka kembali bekerja karena pukul 14.30 wib harus memberi makan udang kembali di tambak dan pukul 16.00 mereka sudah pulang dari pekerjaan mereka. Hal ini juga berlaku di *shift* malam setiap 6 jam sekali mereka memberi makan dan selanjutnya banyak menganggur di tambak. Upah hasil pekerjaan yang mereka dapat sekitar Rp. 950.000. dalam sehari sekitar Rp. 35.000 dengan diberi satu (1) hari libur setiap minggunya.

Representasional pekerjaan warisan dari pengetahuan lokal nenek moyang masyarakat pesisir Pantai Wonogoro dengan bermata pencaharian bertani/berladang, berternak, nelayan, berdagang dalam bermata pencaharian masyarakat masih dipahami memiliki sumber kehidupan. Maka, aktifitas umum kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keseharian warisan pengetahuan lokal nenek moyang mereka

dalam konstruksi produksi ruang mata pencaharian masih tersebut masih dominan dilakukan masyarakat di wilayah pesisir Pantai Wonogoro. Walaupun sebagian dari wilayah hidup mereka telah dipahami sebagai wilayah lingkaran tambang pasir besi KTI III.

### **G. Sosial Keekerabatan dalam Tradisi Budaya di Lingkaran Tambang**

Tradisi tersebut dalam representasi sosial keekerabatan masyarakat di atas mampu meningkatkan keekerabatan dalam ruang sosial masyarakat pesisir Pantai Wonogoro. Ini tercermin ketika ada acara tradisi budaya “*mandhulan*” dan “*nyinoman*” yaitu puncak acara pernikahan. Oleh sebab itu untuk pernikahan masyarakat pesisir pantai Wonogoro membutuhkan dana yang cukup besar seperti yang dikatakan Pak Pandri. Selain itu tradisi seperti melarung sesaji hasil bumi yang diserahkan untuk laut dalam memperingati syukuran atas hasil panen yang masyarakat pesisir Pantai Wonogoro dapat juga masih terpelihara di dalam masyarakat mereka seperti yang dikatakan Bu Suranti. Hubungan sosial keekerabatan masyarakat pesisir Pantai Wonogoro dalam menjaga tradisi budaya mereka bersosial keekerabatan masih sangat terjaga. Di dalam *lived space* sosial keekerabatan masyarakat. Karena representasional pengetahuan lokal dari nenek moyang yang berasal dari perpindahan desa yang sama masih sangat terpelihara di dalam menjalankan tradisi budaya mereka.

### **H. Sosial Keekerabatan dalam Keseharian Di Lingkaran Tambang**

Seiring dengan berbagai kepentingan yang bermacam-macam, sehingga sedikit banyak mempengaruhi hubungan sosial keekerabatan yang mereka pahami. Seperti yang terjadi ketika masyarakat terpecah ketika ada yang pro dan kontra dengan adanya pertambangan pasir besi KTI III di wilayah ruang hidup mereka. Warga yang kontra mengungkapkan karena banyaknya kesepakatan yang tidak ditepati oleh KTI III, warga ingin secepatnya pihak KTI III menepati janji untuk melakukan pengaspalan jalan kampung. Pengetahuan produksi ruang hubungan sosial keekerabatan ini semakin renggang karena pihak “pro” yang seharusnya menjembatani aspirasi masyarakat pesisir pantai Wonogoro malah kurang mendukung aspirasi yang menjadi tuntutan masyarakat pesisir pantai Wonogoro. Seperti yang dikatakan Lefebvre pada peristiwa tertentu

representasional tentang ruang membantu manusia memaknai ruang sebagai ruang yang dipersepsi dalam kerangka berpikir dan direpresentasikan dalam tataran ruang yang semata simbolik. Simbolisme tersebut bewujud dalam pembagian dominan yang sesungguhnya memarjinalisasi lived space. Lived space adalah ruang yang memberi hak untuk perbedaan (Lefebvre , 1990:50-51). Sehingga Lived space itu dapat terungkap ketika dampak yang terjadi masyarakat pesisir Pantai Wonogoro akhirnya selalu mengalami kecurigaan antara pihak satu dan yang lainnya di dalam masyarakat mereka.

### **E. Kesimpulan**

Kehidupan Masyarakat pesisir Pantai Wonogoro yang berasal dari perpindahan masyarakat desa yang sama dan berasal dari hubungan sosial kekerabatan yang umumnya masih memiliki hubungan ikatan persaudaran. Hal ini menyebabkan representasional pengetahuan lokal yang mereka miliki dalam menjalankan kegiatan memenuhi kebutuhan kehidupan keseharian di pesisir Pantai Wonogoro sebagai ruang hidup mereka sama .

Teori produksi ruang Henry Lefebvre, memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi yang dimiliki Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) mampu memberikkan representasi ruang baru di dalam ruang hidup masyarakat pesisir Pantai Wonogoro dengan berbagai representasi ruang yaitu: representasi ruang terhadap wilayah pesisir pantai Wonogoro, representasi ruang terhadap mata pencaharian pesisir pantai Wonogoro, dan representasi ruang terhadap hubungan sosial kekerabatan masyarakat pesisir Pantai Wonogoro.

Representasi ruang wilayah pesisir pantai Wonogoro yang menjadi wilayah lingkaran tambang Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III), menyebabkan muncul berbagai kesepakatan ekonomi antara masyarakat dan pihak KTI III. Dari berbagai kesepakatan ekonomi tersebut memunculkan sebuah representasi ruang mata pencaharian baru terhadap masyarakat pesisir pantai Wonogoro dengan menjadi pegawai atau buruh pertambangan KTI III . Hal ini berpengaruh dalam representasi ruang sosial kekerabatan di dalam masyarakat pesisir Pantai Wonogoro karena kesepakatan ini memunculkan pro dan kontra di dalam masyarakat pesisir Pantai

Wonogoro. Sehingga memunculkan sebuah hubungan saling kecurigaan di dalam masyarakat pesisir pantai Wonogoro.

Produksi ruang hidup masyarakat pesisir terhadap wilayah pesisir Pantai Wonogoro yang didapatkan dari warisan pengetahuan lokal nenek moyang mereka masih terpelihara sampai saat ini. Representasi ruang baru yang dilakukan oleh Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) terhadap ruang wilayah hidup dengan adanya wilayah lingkaran tambang pesisir Pantai Wonogoro, tidak sepenuhnya dapat merubah representasional ruang yang dihasilkan dari warisan pengetahuan lokal nenek moyang masyarakat pesisir Pantai Wonogoro. Hal ini terlihat dengan adanya lived space yang memberi ruang bagi masyarakat pesisir Pantai Wonogoro untuk memelihara tradisi budaya yang mereka miliki.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adhan, S. (2010). *Bencana industri relasi negara, perusahaan, dan masyarakat*. Yogyakarta: Desantara
- Berg, B. (2007). *Qualitative research methods for the social sciences*. Boston: Pearson Education.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bungin, B. (2008). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhanuddin, S et al. (2006). *Kewirausahaan pemuda bahari*. Jakarta: Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga.
- Firmanto, A.B. (2012). *Degradasi lingkungan*. Jakarta: Warta Minerba
- Geertz, C. (2003). *Pengetahuan lokal*. Yogyakarta: Merapi

### Prosiding

- Iskandar, J. (2011). Prespektif Etnobiologi dalam keanekaragaman hayati dan Layanan Ekosistem. *Makalah Seminar Nasional Keaneka-an Hayati dan Layanan Ekosistem*. Bandung: Unpad
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Translated by Donald Nicholson-Smith.

Oxford: Blackwell.

- Moleong, L.J. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rijanta, R., dkk., (2005). *Ilmu wilayah (GPW 1102)*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Edisi kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rustiadi, E, et al, (2007), *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Bogor: Crestpent Press, P4W- LPPM IPB
- Sitorus, F. (1998). *Penelitian kualitatif: Suatu pengantar*. Bogor: Fakultas Pertanian IPB.
- Susilo, E dkk. (2010). *Kajian struktur sosial masyarakat nelayan di ekosistem pesisir*. Malang : Universitas Brwajaya
- Wuisman, J.J. (1991). *Metode penelitian ilmu sosial*. Malang: Dwi Murni
- Spradley, J.P. (1997). *Metode Etnografi Cetakan Pertama* . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo dan Joshi,L. 2003. *Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforesti*. Bogor.

## **Skripsi**

- Yunita, R. 2012. *Produksi ruang lingkungan tinggal desa melalui konstruksi pengetahuan lokal masyarakat di Desa Sidoasri, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang*. (Skripsi tidak dipublikasikan) Universitas Brawijaya, Indonesia

## **Internet**

- Saifuddin, A.F. (2006). Antropologi kontemporer: suatu pengantar kritis mengenai paradigma. *Berdikari Online*. <http://m.berdikarionline.com/kabar-rakyat/bedah-buku-kabar->
- Pemkab Malang Langgar Tata Aturan Pantai. (2014, 6 Mei). *Harian Bhirawa*. <http://harianbhirawa.co.id/2014/05/pemkab-langgar-aturan-tata-ruang-pantai>



### **Biografi penulis**

Rizqi Samudra Muhammad lahir di Malang 29 Mei 1990. Putra pertama dari M. Sofyan A dan Nurul Hidayani ini telah menyelesaikan studi yang diawali dari SDN Bunulrejo IV Malang, lulus pada tahun 2002, berlanjut pada SMP 20 Malang, kemudian pada tahun 2005 berlanjut di SMA "Islam" Malang. Penulis menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya Malang di tahun 2008 dan memperoleh gelar sarjana di tahun 2015.

Keterlibatan penulis di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, penulis penasihat Praktikum Kerja Lapangan (PKL) di PT. Berau Coal Berau Kaltim tahun 2011, kemudian melakukan penelitian dan rancangan pembukuan peraturan adat Dayak Kenyah Badeng Kab. Berau di tahun 2012, kemudian Penelitian Sanitasi Lingkungan Kabupaten Malang 2013, selanjutnya Penelitian KUR BRI JATIM 2013 dan penelitian untuk mencapai gelar sarjana (S1) melakukan penelitian mengenai Produksi Ruang Hidup Masyarakat Pesisir di Dusun Sukorejo Kab. Malang 2014.

Email: [m\\_samudra29@yahoo.com](mailto:m_samudra29@yahoo.com)